

andaikan seolah pengaruh pihak adikuasa terhadap korbannya itu demikian linear dan terprediksi, dan seolah pihak korban sedemikian teralienasi dari dirinya sendiri hingga total menjadi sekadar mesin fotokopi. Bagaimana pun fenomena kebudayaan adalah transaksi makna dan nilai, di dalamnya reflektivitas individu tidak hanya me-reproduksi pola-pola dari luar, melainkan sekaligus juga menciptanya ulang sesuai kepentingan partikularnya sendiri (mekanisme *autopoiesis*). Simbol dan ikon boleh menyebar di pasar dunia, tapi bagaimana itu dimaknai bisa tidak sama, mudah mengalami *de-territorialisasi*, berubah menjadi parodi, subversi, aksesoris, dst. Tak usah heran bila huruf "M" ala MTV di Papua menjadi simbol gerakan kemerdekaan ("M" = Merdeka!). Dan reflektivitas individu, dengan tendensi partikularitasnya itu, sebenarnya tetaplah merupakan pusat gravitasi modernitas, yang de facto telah menyebabkan modernisasi menjadi proses yang justru tak seragam, rangkaian proses 'pembatalan diri' tak berkesudahan (*self-cancelling process*), rangkaian aneka perubahan, selalu bersifat 'post', penuh konsekuensi tak terencana yang menjejalkan (Giddens).

Kedua, konsep hegemoni mengandaikan adanya pengkutuban yang substansial: pihak adikuasa dan pihak yang tertekan. Dalam tulisan Budiarto Danujaya kutub itu adalah 'Global'vs'lokal', yang diidentikan dengan 'Barat'

vs 'Non-Barat'. Masalahnya, pengkutuban macam itu kini terasa terlampau simplistik dan naif, sebab bahkan dalam yang disebut 'Barat' atau 'Timur' itu sendiri kini secara intern terdapat demikian banyak orientasi nilai yang berbeda dan bahkan saling bertentangan. Makin banyak pemikir Barat yang mengkritik nilai-nilai Barat sendiri, atau orang Timur yang meragukan klaim-klaim ke-Timuran sendiri.



Segala bentuk penindasan dan ketidakadilan mesti tetap dilawan.

Tulisan saya terdahulu persis menekankan, bahkan meradikalisasi, tendensi konflik dan perbedaan hingga ke tingkat internal kebudayaan itu. Maka juga tidak tepat bila disebutkan bahwa "kelangsungan timbal-balik (*yang saya usulkan, pen*) mengandaikan kebudayaan sebagai ruang netral dan harmonis" seperti ditulis Budiarto. Hal lain adalah, kategorisasi tradisional Barat-Timur, dan sebagainya, kini juga tak lagi memadai untuk memetakan persoalan jaringan dunia sebab jaringan itu semakin kompleks,

multiscape dan tumpangtindih antara *technoscape*, *mediascape*, *financescape*, *ideoscape*, dan sebagainya, yang konfigurasiya tak lagi bersifat biner oposisional sederhana, melainkan serupa fraktal, non-sinkronik, deterritorial, non-hierarkis, semua menghadapi semua sekaligus, kontekstual, rizomatik, berubah-ubah. Kalaupun saat-saat tertentu konfigurasi kawan dan lawan itu tampak jelas, maka itu lebih semacam pengkutuban aliansi-aliansi temporer demi kepentingan tertentu saja, itu pun biasanya tampil karena dikonstruksi oleh wacana.

Ketiga, walaupun istilah 'hegemonik' masih mau digunakan, maka perlu dilihat bahwa tendensi hegemonik justru terletak terutama pada kecenderungan memastikan dan menunggalkan makna-makna, yang sebetulnya majemuk dan tak stabil itu, dalam wacana (Derrida). Makna-makna penanda dan imaji, yang dalam kenyataan demikian kompleks, berragam dan tak jelas, ditetapkan dan dipastikan dalam konsep-konsep besar macam 'Dunia ketiga', 'Global-lokal', 'konflik peradaban', 'Barat-Timur', dst. Konsep-konsep ini adalah alat diskursif untuk melestarikan dan mengkonstruksi superioritas dan identitas secara tidak adil. Namun di sini pun yang menjadi isu pokok adalah 'ketidakadilan'nya, bukan relasionalitasnya.

Keempat, teori hegemoni, kendati dalam hal tertentu bisa memperlihatkan struktur tersembunyi yang menindas, cenderung membuat kita melempar-

kan penyebab situasi buruk pada pihak eksternal di luar kita, semacam mencari kambing hitam, hingga menjadi kurang peka terhadap kelemahan dan ketidakmampuan diri sendiri. Perspektif relasional melihat segala bentuk ketertindasan sebagai produk timbal-balik. Baik penindas maupun tertindas kedua-duanya penyebab dan akibat, keduanya mengalami dehumanisasi, keduanya perlu dibebaskan. Dan yang paling mampu membebaskan itu hanyalah diri sendiri. Maka sambil memberi kritik atas kerangka-teoretis pihak lain, misalnya, lebih penting lah kita belajar semakin piawai mengartikulasi diri, membangun teori, kategorisasi dan klasifikasi versi kita sendiri dan bertarung dalam pasar wacana.

Segala bentuk penindasan dan ketidakadilan mesti tetap dilawan. Identitas mesti terus diperjuangkan lewat proses identifikasi berkesinambungan. Dalam kerangka itu, paradoksnya, memang diperlukan kategorisasi biner yang agak pasti macam 'laki-perempuan', 'Barat-Timur', namun itu hanyalah *pemastian-pemastian sementara, kontekstual, dan 'fiksional'*, dalam rangka *penyeimbangan, pada konteks proyek tertentu* saja. Di sisi lain tetaplah perlu terus-menerus mendefinisikan ulang arti konsep-konsep itu *secara relasional*, hingga pemahamannya berkembang terus sesuai kompleksitas kenyataan.

BAMBANG SUGIHARTO,
Pengajar Filsafat di Unpar